

**ANALISIS PENGELOLAHAN DANA DESA
(STUDI PADA DESA BULANGAN KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019)**

SKRIPSI



Oleh

**CHETRINE INDAH AYU PANGESTIKA
NIM : 16520041**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**ANALISIS PENGELOLAHAN DANA DESA
(STUDI PADA DESA BULANGAN KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



O l e h

**CHETRINE INDAH AYU PANGESTIKA
NIM : 16520041**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PENGELOLAHAN DANA DESA
(STUDI PADA DESA BULANGAN KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019)**

Oleh

CHETRINE INDAH AYU PANGESTIKA

NIM : 16520041

Telah disetujui pada tanggal 4 Maret 2021

Dosen Pembimbing,



Sulis Rochayatun, M.Akun., CA., Ak., CMA., CSRA.

NIDT. 19760313 20180201 2 188

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



Dr. H. Nadek Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS PENGELOLAHAN DANA DESA
(STUDI PADA DESA BULANGAN KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019)

SKRIPSI

Oleh

CHETRINE INDAH AYU PANGESTIKA
NIM : 16520041

Telah diseminarkan 25 Juni 2021

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua
Nawirah, SE., MSA., Ak., CA
NIP. 18860105 201802012 185
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Sulis Rochayatun, M. Akun., CA., Ak., CMA., CSRA.
NIP. 19760313 20180201 2 188
3. Penguji Utama
Kholilah, SE., MSA., Ak
NIP. 19870719 2019032 010



Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Dr. Hk. Nurik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 0

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chetrine Indah Ayu Pangestika

Nim : 16520041

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PENGELOLAHAN DANA DESA (Studi Pada Desa Bulangan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2019)

Adalah hasil karya saya sendiri , bukan "duplikasi " dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 25 Juni 2021

Hormat saya,



Chetrine Indah Ayu Pangestika

NIM : 16520041

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukurkurku kepada Allah SWT yang tak henti hentinya senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan karya sederhana ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa saya persembahkan kepada suri tauladan seluruh umat manusia Rasulullah Muhammda SAW atas perjuangannya kita bisa menikmati mencari ilmu.

Karya ini saya persembahkan kepada Ibu saya yang selama ini mensupport saya Ibu Nur Kholifah. Berkat perjuangannya siang dan malam mencari rezeki sehingga memotivasi saya untuk terus berusaha menjadi yang terbaik dan kebanggaan beliau. Tak lupa juga untuk teman teman saya yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tanpa mengurangi rasa hormat saya, karya ini dipersembahkan kepada seluruh dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya bapak dan ibu dosen akuntansi, Fakultas Ekonomi yang telah sudi menjadi pengganti orang tua selama mengenyam pendidikan

MOTTO

”Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”.

(QS Al Insyirah:6)

“Siapa yang bersungguh sungguh pasti berhasil”

“Siapa yang bersabar pasti berhasil”

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Studi pada Desa Bulangan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019”

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din Al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sulis Rochayatun, M.Akun., CA., Ak., CMA., CSRA., selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kepada Ibu saya dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do’a dan dukungan secara moral dan spiritual.
7. Seluruh aparat Desa Bulangan yang telah memberi izin penelitian.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
المستخلص	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kajian Teoritis	15
2.2.1 Desa.....	15
2.2.2 Dana Desa	18
2.2.3. Pemerintah Desa.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
3.2 Lokasi Penelitian	42

3.3	Subyek Penelitian	42
3.4	Data dan Jenis Data	43
3.5	Teknik Pengumpulan Data	44
3.6	Analisis Data	45
BAB IV PEMBAHASAN.....		46
BAB V PENUTUP.....		73
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN.....		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.....	4
Tabel 2.1 Hasil Hasil Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 4.2 Nama Pejabat Pemerintah Desa Bulangan.....	52
Tabel 4.3 Nama Badan Permusyawaratan Desa Bulangan.....	53
Tabel 4.4 Pendapatan Dana Desa Tahun 2019.....	56
Tabel 4.5 Analisis Perbandingan Pengelolaan Dana Desa Bulangan Dengan Permendagri.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Pengelolaan Dana Desa.....	41
Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Bulangan.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara

Lampiran 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

Lampiran 3 Buku Kas Umum Tunai

Lampiran 4 Buku Kas Pembantu Pajak

Lampiran 5 Penyerahan BLT (Program Covid)

Lampiran 6 Kantor Balai Desa Bulangan

Lampiran 7 Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Lampiran 8 Biodata Peneliti

ABSTRAK

Chetrine Indah Ayu Pangestika. 2021, SKRIPSI. Judul: “Analisis Pengelolaan Dana Desa Studi pada Desa Bulangan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik”

Pembimbing : Sulis Rochayatun, M.Akun., CA., Ak., CMA., CSRA

Kata Kunci :Pengelolaan Dana Desa, Permendagri No.113 Tahun 2014.

Dana desa diperuntukkan untuk desa yang bersumber dari APBN, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Pencairan dana desa digunakan untuk membiayai segala aktivitas dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta guna untuk pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bulangan Tahun Anggaran 2019 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pada Desa Bulangan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, partisipan dan dokumentasi. Informasi dari penelitian ini yaitu Kepala Desa Bulangan, Sekertaris Desa Bulangan, dan kaur Keuangan Desa Bulangan.

Hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan Dana Desa Bulangan Kecamatan Dukun Tahun 2019, secara garis besar telah mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Permendagri No.60 Tahun 2018. Tiga tahap pengelolaan dana desa yaitu tahap perencanaan, pelaporan, dan Pertanggungjawaban Desa Bulangan dalam menerapkan sudah sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Meskipun dalam tahap penatausahaannya terdapat beberapa yang masih belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sehingga pengelolaan keuangan di Desa Bulangan belum optimal yaitu kaur keuangan kurang cukup memahami proses penatausahaan dana desa sebagai fungsi dari bendahara kaur keuangan melimpahkan penatausahaan kepada sekertaris desa.

ABSTRACT

Chetrine Indah Ayu Pangestika. 2021, *THESIS*. Title: "Analysis of Study Village Fund Management in Bulangan Village, Dukun Subdistrict, Gresik Regency"

Supervisor : Sulis Rochayatun, M.Akun., CA., Ak., CMA., CSRA

Keywords : Management of village funds Permendagri No. 113 Tahun 2014

Village funds are allocated for villages sourced from the APBN, which are transferred through the district/city regional budget. The disbursement of village funds is used to finance all activities in government administration, development implementation, community development, as well as for the empowerment of village communities. The purpose of this study was to evaluate the management of village funds carried out by the Bulangan Village government for the 2019 Fiscal Year starting from planning, implementation, administration, reporting and accountability in Bulangan Village, Dukun District, Gresik Regency.

This type of research is qualitative research while the data collection techniques used are interviews, observations, participants and documentation. Information from this research is the Head of Bulangan Village, Secretary of Bulangan Village, and the Finance Head of Bulangan Village.

The results showed that the Management of the Bulanan Village Fund in the Dukun Subdistrict in 2019, in general, had referred to Permendagri No. 113 of 2014 and Permendagri No.60 of 2018. The three stages of managing village funds, namely the planning, reporting, and accountability stages of the Bulannan Village in implementing were appropriate. with the Ministry of Home Affairs Number 20 of 2018 and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014. Although in the administrative stage there are some that are still not in accordance with the established regulations so that financial management in Bulangan Village is not optimal, namely the financial officer does not sufficiently understand the process of administering village funds as a function of the Treasury treasury. Finance delegates administration to the village secretary.

المستخلص

شيترين إنداه أيو بانجيسيتكا. 2021 ، أطروحة. العنوان: "تحليل إدارة صندوق قرية الدراسة في قرية بولانجان ، منطقة دوكون ، ريجنسي جريسيك"

المشرف : سوليس روشاياتون، CSRA ،CMA. ،Ak. ،CA. ،M. Account. الكلمات المفتاحية: إدارة صندوق القرية ، Permendagri رقم 113 لعام 2014.

يتم تخصيص أموال القرية للقرى التي يتم الحصول عليها من APBN ، والتي يتم تحويلها من خلال الميزانية الإقليمية للمقاطعة / المدينة. يستخدم صرف الأموال القروية لتمويل جميع الأنشطة في الإدارة الحكومية ، وتنفيذ التنمية ، وتنمية المجتمع ، وكذلك لتمكين المجتمعات القروية. كان الغرض من هذه الدراسة هو تقييم إدارة الأموال القروية التي نفذتها حكومة قرية بولانجان للسنة المالية 2019 بدءًا من التخطيط والتنفيذ والإدارة وإعداد التقارير والمساءلة في قرية بولانجان ، مقاطعة دوكون ، مقاطعة جريسيك.

هذا النوع من البحث هو بحث نوعي بينما تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والملاحظات والمشاركين والتوثيق. معلومات من هذا البحث هي رئيس قرية بولانجان ، وسكرتير قرية بولانجان ، والمدير المالي لقرية بولانجان.

أظهرت النتائج أن إدارة صندوق القرية الشهري في منطقة دوكون في عام 2019 ، بشكل عام ، قد أشارت إلى Permendagri رقم 113 لعام 2014 و Permendagri رقم 60 لعام 2018. إدارة أموال القرية من التخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير و تتماشى المساءلة أيضًا مع وزارة الداخلية رقم 20 لعام 2018 ولائحة وزير الداخلية رقم 113 لعام 2014. على الرغم من أنه في المرحلة الإدارية ، لا يزال البعض غير متوافق مع اللوائح المعمول بها حتى تتمكن الإدارة المالية في بولانجان القرية ليست الأمثل. ومن الأمثلة على ذلك أن المسؤولين الماليين لا يفهمون بشكل كافٍ عملية إدارة الأموال القروية. مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة. على الرغم من القيود المفروضة على إدارة الأموال القروية في تنفيذ متلقي الدخل المحول من القرية يعانون أحيانًا من تأخير في صرف هذه الأموال وتوزيعها.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian terdapat perubahan dalam PP Nomor 8 Tahun 2016, dimana isi peraturan yang dikeluarkan agar setiap desa mendapatkan dana yang diberikan pemerintah pusat maksimal Rp. 1,4 M per desa. Dana desa yaitu dana yang diperuntukkan untuk desa yang bersumber dari APBN, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Pencairan dana ini digunakan untuk membiayai segala aktivitas dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta guna untuk pemberdayaan masyarakat desa. (Anisah, 2018)

Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini telah menunjukkan bahwa desa merupakan suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaannya desa akan bersangkutan langsung dengan masyarakat dalam peranan desa memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan dana desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang

handal serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik. (Khalida Shuha, 2018)

Dewasa ini pemerintah pusat sedang berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan pembangua nasional yang merata desa dan kota, dengan adanya pertumbuhan pembangunan yang merata pemerintah berharap agar masyarakat di desa tidak berbondong bondong ke kota. Sehingga, masyarakat dapat membangun desanya dan dapat setara dengan pertumbuhan pembangunan di kota, dan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan serta pembangunan di desa mayarakat des yang awalnya di kota diharapkan kembali ke desanya dan ikut serta dalam pembangunan desanya atau masyarakat kota yang awalnya tinggal di kota memilih untuk pindah ke desa dalam rangka turut serta meningkatkan pertumbuhan pembangunan yang merata. Namun, untuk mewujudkan pembangunan yang merat antar desa dan kota terdapat beberapa masalah,. Untuk mengatasi masalah yang ada pemerintah harus menaruh perhatian penuh terhadap peningkatan pertumbuhan pembangunan yang merata di desa untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. (Nunuk Ariyani, 2016)

Dalam mengatasi masalah yang ada pemerintah menyediakan dana desa. Dana desa diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada dalam meningkatkan pertumbuhan pembangunan di desa. Menurut Peraturan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa adalah yang bersumber dari Anggaran Pendapatn dan Belanja Negara yang diperun jukkan bagi desa yang ditransfer memlalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pada Mei tahun 2015 dana desa mulai diadakan oleh pemerintah pusat, pada tahun 2017 pemerintah pusat menaikkan anggaran dana desa sebesar Rp 60 triliun, dimana dana tersebut akan dicairkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dana desa yang dicairkan bersumber dari Anggaran Belanja Pendapatan dan Negara (APBN). Pengalokasian dana desa dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. (www.anggaran.kemenkeu.go.id,2017)

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegritas antara satu tahapan dengan tahapan yang lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan dana desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat desa yang sejahtera dapat diwujudkan. (Nunuk Ariyanti, 2016)

Dikurkannya dana Desa yang tidak sedikit oleh pemerintah dimana realisasi dana Desa hingga agustus 2019 telah mencapai Rp 42,2 triliun dari target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2019 yang sebesar 70 triliun.

Dana Desa sendiri mulai diimplementasikan sejak 2015 untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa dimana setiap tahunnya pemerintah menargetkan alokasi dana Desa selalu meningkat. Adapun realisasi dana Desa sejak diimplementasikan sebesar Rp 20,8triliun dari target APBN 2015 dan Rp 46,7 triliun dari target APBN 2016, pada 2017 realisasi dana Desa sebesar Rp 59,8 triliun dari target APBN 2017, tahun lalu realisasi dana Desa mencapai Rp 59.9 triliun dari target APBN 2018 (Databoks, februari 2020)

Dari hasil pra penelitian pada desa Bulangan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, laporan pertanggungjawaban menunjukkan realisasi dana desa digunakan lebih banyak untuk infrastruktur dari pada untuk pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini dapat dikaitkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
Tahun Anggaran 2019
Pemerintah Desa Bulangan
Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Uraian	Penerimaan (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)	Sisa (Rupiah)
1. Pendapatan			
1.1 Dana Desa	72.000.000		
1.2 Pendapatan Transfer	1.359.740.000		
1.3 Pendapatan Lain lain	1.650.685,00		
2. Belanja			
2.1 Bidang Pelaksanaan Pemerintah Desa		378.905.685	
2.2 Bidang Pelaksanaan		862.801.000	

pembangunan Desa			
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		61.300.000	
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat		40.000.000	
	1.433.390.685	1.340.006.685	93.384.000

Sumber: Laporan realisasi penggunaan dana desa pada Desa Bulangan

Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2019

Desa Bulangan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik mengalokasikan anggaran lebih besar pada insfrastruktur. Hal ini mengggabarkan bahwa alokasi anggaran dana desa di Desa Bulangan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik kurang sesuai dengan tujuan diadakannya dana desa. Berdasrkan hasil penelitian pada Desa Bulangan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Kelemahan dari pengelolaan dana desa adalah kurangnya pengetahuan dalam dalam tahap tahap pengelolaan dana desa serta kurangnya sumber daya manusia akan Juklas, Juknis ataupun Perbup tentang tatacara penatausahaan yang masih kurang, dan kurangnya pengawasan langsung oleh pemerintah daerah dalam pengecekan realisasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Kurangnya pengetahuan kaur keuangan dalam pengelolaan penatausahaan ini sebagai fungsi kebendaharaan kaur keuangan melimpahkan pengelolaan penatausahaan kepda sekertaris desa. Hal ini tidak sesuai dengan tugas dan fungsi kaur keuangan. Dimana tugas kaur keuangan yaitu mengurus seluruh urusan administrasi dan sumber sumber pendapatan dan pengeluaran. Dari penelitian ini dapat kita lihat bahwa hal yang menjadi kendala pengelolaan dana desa adalah masih kurangnya

SDM, pengetahuan SDM akan regulasi tatacara penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, dan pengawasan pemerintah daerah terhadap pemanfaatan dana desa.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan Desa yang diatur dan dikelola oleh Desa. Pengelolaan keuangan Desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pengelolaan keuangan merupakan suatu siklus yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Siklus tersebut merupakan rangkaian terpadu dan terintegrasi, dimana tahap satu dengan tahap lainnya saling berkesinambungan sehingga apabila terjadi kesalahan dalam salah satu tahap maka untuk tahap berikutnya pun akan terganggu dan tujuan pengelolaan keuangan tidak sesuai dengan sasaran (Yabbar, 2015).

Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sr. Udis (2016) pada Desa Nimasi Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Kelemahan dari Penerapan Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa adalah Buka Kas Umum dan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa yang disipkan Desa Nimasi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Tidak adanya dokumen dokumen bku kas pembantu kegiatan dan surat permintaan pembayaran yang seharusnya dikerjakan oleh tim pelaksana kegiatan, tidak adanya buku kas pembantu pajak dan buku bank desa yang seharusnya dicatat atau dibukukan oleh Bendahara Desa Nimasi. Serta masih rendahnya sumber daya manusia yang ada di dalam hal ini perangkat desa dan tim pelaksana Desa Nimasi masih sangat rendah. Dari penelitian terdahulu dapat

dilihat bahwa masih kurangnya dokumen dokumen yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, belum melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai pedoman dan belum adanya surat permintaan pembayaran untuk diserahkan kepada kepala desa setelah diverifikasi oleh sekretaris desa, serta masih rendahnya sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan fenomena dan penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Bulangan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2019)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Analisis Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bulangan Tahun Anggaran 2019 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian yaitu untuk mengevaluasi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bulangan Tahun Anggaran 2019 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dalam bidang Akademis diharapkan dapat bermanfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan masukan dan menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya. Untuk Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi konsentrasi keuangan daerah khususnya dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN pada pemerintah Desa Bulangan.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan pada Pemerintah Desa Bulangan dalam hal bagaimana cara mengelola dana desa yang sesuai dengan peraturan bupati yang telah diterapkan di desa, dan sesuai dengan kebutuhan desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam menulis sehingga dapat memperluas teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penulis mengangkat beberapa untuk dijadikan referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa terkait dengan yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1
Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Dan Pembahasan
1	Elma Julita (2018)	Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh pemerintah di Sungai Ara	Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan dana desa (DD) di Sungai Ara mulai tahapan perencanaan dana desa telah sesuai dengan peraturan pengelolaan DD. Pada tahap pelaksanaan terlihat adanya hambatan diantaranya tidak mengertinya perangkat terhadap tugas pokok dan fungsi masing masing serta kurangnya komunikasi antar sesama anggota oleh tim pelaksana kegiatan dan mengalami kendala dikarenakan kondisi alam (Banjir), tidak selesainya pembangunan yang dilakukan dan keterlambatan transfer

				DD dari Kabupaten.
2	Inten Meutia, Liliana (2018)	Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kbupaten Ogan Ilir Sumantera Selatan.	Deskriptif kualitatif	Pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa yang dilakukan di desa telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri No 113 tahun 2014. Pedoman pengelolaan meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai pengawasan telah dilaksanakan. Namun pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah bagi desa tersebut, dikarenakan adanya keterbatasan yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban serta ada beberapa hambatan yang mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga tidak memberikan <i>multiplier effect</i> bagi masyarakat desa dalam pembangunan.
3	Khalida Shuha (2018)	Analisis Pengelolaan Dana Desa (studi kasus pada Desa Slikungan Kecamatan Lubuk Alung	Deskriptif kualitatif	Perencanaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan Pelaksanaan, Penatausahaan,

		Kabupaten Padang Pariaman).		Pelaporan dan Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2) Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu, sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, internet dan pemahaman masyarakat. (3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, pengembangan sistem seleksi perangkat nagari, meningkat tingkat pendidikan, dan pelatihan.
4	Nurul Hidayah (2017)	Analisis Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.	Deskriptif kualitatif	Dalam aspek pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, walaupun sepenuhnya belum sempurna, khususnya dalam hal system pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan dana desa. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban masih mengalami kesulitan.
5	Yamulia Hulu (2017)	Analisis pengelolaan dana desa dalam	Deskriptif kualitatif	pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak

		<p>memberdayakan penduduk desa dan untuk mencari tahu beberapa faktor yang memungkinkan dan menghambat dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Segi</p>		<p>transparan, penduduk desa tidak berpartisipasi secara aktif, dan pejabat pemerintah desa lebih dominan dalam merencanakan kegiatan dan pelaksanaan dana desa. Kegiatan pemberdayaan diprioritaskan untuk pemberdayaan fisik seperti pembangunan jalan dan limbah, sementara pemberdayaan non-fisik terkait dengan pelatihan resmi pemerintah desa dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Persamaan dalam penelitian ini terletak pada subyek yang diambil yaitu tentang pengelolaan dana desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Sedangkan perbedaanya terletak pada obyek penelitian yaitu di Desa Tetelesi Sorowi Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara.</p>
6	Moh. Sofiyanto (2017)	<p>Analisis pengelolaan dan dampak dana desa di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampan</p>	Deskriptif kualitatif	<p>pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak transparan, penduduk desa tidak berpartisipasi secara aktif, dan pejabat pemerintah desa lebih dominan dalam merencanakan kegiatan dan pelaksanaan dana desa. Kegiatan</p>

				pemberdayaan diprioritaskan untuk pemberdayaan fisik seperti pembangunan jalan dan limbah.
7	M.Indra Maulana (2016)	Analisis peran dana desa dalam pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan perekonomian desa dan untuk mengetahui bagaimana peran dana desa ditinjau dari perspektif ekonomi islam	Deskriptif kualitatif	pengolahan dana desa yang ada di Desa Sinar Palembang, berjalan dengan berpatokan pada petunjuk teknis yang ada sehingga pemberdayaan masyarakat dari tahun 2015 sampai pada tahun 2017 mulai meningkat, dilihat dari pembangunan, namun masih minim dalam peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat.
8	Ade Irmayang (2015)	Analisis pengelolaan dan dampak dana desa di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampan	Deskriptif kualitatif	pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak transparan, penduduk desa tidak berpartisipasi secara aktif, dan pejabat pemerintah desa lebih dominan dalam merencanakan kegiatan dan pelaksanaan dana desa. Kegiatan pemberdayaan diprioritaskan untuk pemberdayaan fisik seperti pembangunan jalan dan limbah, sementara pemberdayaan non-fisik terkait dengan pelatihan resmi pemerintah desa dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).

Persamaan dan perbedaan dari penelitian di atas adalah sebagai berikut :

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Elma Julita (2018)	Unsur keuangan yang digunakan membahas dana desa (DD) dari APBN di lingkup satu desa serta analisis dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Penelitian terdahulu menggunakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sedangkan penulis menggunakan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
2.	Inten Meutia, Lilian (2018)	Tahap yang digunakan memiliki kesamaan diantaranya, reduction data, display data serta objek penelitian yang digunakan memiliki kesamaan yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Pedoman pengelolaan keuangan desa menggunakan beberapa pedoman tentang pengelolaan keuangan desa mulai Permendagri Nomor 20 Tahun 2010 sampai dengan Perbup Mojokerto Nomor 7 Tahun 2018.
3.	Khalida Shuha (2018)	Pedoman pengelolaan keuangan desa yaitu pengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.	Objek penelitian, lokasi penelitian.
4.	Nurul Hidayah (2017)	Objek penelitian yang digunakan seperti prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa serta anggaran yang berpusat pada pengelolaan dana desa.	Lokasi penelitian berada di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, sedangkan penulis berada di Desa Bulangan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
5.	Yamulia Hulu (2017)	Subyek yang diambil yaitu tentang pengelolaan dana desa dalam memberdayakan masyarakat desa.	Obyek penelitian yaitu di Desa Tetehosi Sorowi Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara. Sedangkan penulis objek penelitian di Desa Bulangan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
6.	Moh. Sofiyanto	Tahap perencanaan dan	Objek penelitian, lokasi

	(2017)	pelaksanaannya secara teknik baik.	penelitian.
7.	M. Indra Maulana (2016)	pedoman pengelolaan keuangan desa yaitu pengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.	melaksanakan tugasnya berpatokan dengan nilai dasar ekonomi islam.
8.	Ade Irmayang (2015)	Tahap perencanaan dan pelaksanaannya secara teknik baik	Sumber daya manusia pengelola masih merupakan kendala utama, sedangkan dengan penulis sumber daya manusia pengelola tidak menjadi kendala..

Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian diatas ialah mengkaji dan menganalisis pengelolaan dana desa.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Desa

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa (kata benda) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Desa atau perdesaan berasal dari bahasa *Sansekerta* secara denotatif desa berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan permukiman yang mengatur dirinya sendiri, sedangkan secara konotatif mengandung arti sebagai wilayah jajahan, dalam arti keberadaan desa tidak terlepas

dari organisasi yang lebih tinggi yakni negara, baik pada bentuk negara modern maupun kerajaan. (Ardi Hamzah, 2017)

Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya, perwujudan atau kenampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 dijelaskan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Maschab, 2013)

Desa memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Sehingga, dalam UU No 6 tentang Desa, pendekatan pembangunan dilakukan melalui dua konsep yaitu desa membangun dan membangun desa. Fokus pembangunan dalam desa membangun bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan Kabupaten dan

Kota menjadi acuan dalam desa membangun.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat (5) tentang Desa, menjelaskan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Istilah desa dalam beberapa tempat disebut dengan nama lain seperti di Bali disebut dengan istilah banjar, di Nusa Tenggara Barat disebut dengan istilah temukung, dll. Menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, unsur-unsur yang harus dimiliki oleh desa sebagai berikut:

1. Wilayah

Pengertian wilayah adalah suatu letak geografis suatu desa yang dalam hal ini desa mempunyai kekuasaan penuh atas daerah dalam garis batas tersebut. Jadi wilayah adalah segala kegiatan pemerintahan desa.

2. Penduduk

Pengertian penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dan mempunyai hubungan secara sah menurut aturan yang ada.

3. Pemerintah

Pemerintah berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan desa.

2.2.2 Dana Desa

Dana desa menurut PP No. 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dana desa tersebut bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Program yang berbasis desa sendiri menurut PP No. 60 Tahun 2014 adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. PP No. 22 Tahun 2015 menyoroti perubahan pengalokasian dana desa yang tercantum dalam pasal 11, yang mana dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. (Khalida Shuha, 2018)

2.2.3. Pemerintah Desa

Dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Pengertian ini mengandung makna dan konsekuensi logis dalam penataan sistem pemerintahan dan birokrasi. Dalam batang tubuh Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999, desa tidak dinyatakan secara eksplisit memiliki otonomi, tetapi disebutkan memiliki otonomi asli berada dalam bagian penjelasan. Hal lain menyangkut keberadaan pemerintah desa yang memposisikan pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa sebagai pemegang pemerintahan “birokrasidesa”. Kemungkinan lembaga lain yang telah lama diakui oleh masyarakat sulit untuk memegang peranan ini.

Pemerintahan desa merupakan sub sistem, dalam sistem pemerintahan nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan pemerintahan desa dan Perangkat Desa, yang akan menghasilkan Kepala Desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin desa atau lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan.⁷ Susunan pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa (Pemdes) dan di Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemdes dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa. BPD adalah badan perwakilan yang terdiri dari atas pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta

melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa.
(Mardiasmo, 2009)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1-2) tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 dalam paragraf 3, kepala desa memegang jabatan paling lama tiga kali masa jabatan secara berturut-turut. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada masa akhir jabatan kepada bupati atau walikota.

- c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Laporan penyelenggaraan pemerintah desa tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi bupati/walikota untuk dasar pembinaan yang isinya paling memuat pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

1. Perangkat Desa

Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya. Salah satu perangkat desa adalah sekretaris desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggotan BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan

sebagai kepala desa dan perangkat desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (Awang, 2010)

2.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan merupakan suatu siklus yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Siklus tersebut merupakan rangkaian terpadu dan terintegrasi, dimana tahap satu dengan tahap lainnya saling berkesinambungan sehingga apabila terjadi kesalahan dalam salah satu tahap maka untuk tahap berikutnya pun akan terganggu dan tujuan pengelolaan keuangan tidak sesuai dengan sasaran. Adapun pengelolaan keuangan desa harus berpegang teguh pada tata pemerintahan yang baik, yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan keadilan (Ardi Hamzah, 2015).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 menyatakan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam Bab V tentang Pengelolaan, Pengelolaan Keuangan Desa terbagi menjadi 5 bagian. Adapun 5 bagian tersebut adalah sebagai berikut

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban

Adapun penjabaran dari Peraturan Pemerintah No. 113 tahun 2014

Bab V tentang Pengelolaan adalah sebagai berikut :

2.2.3.1 Perencanaan

- Dalam pasal 20 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :
 - a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
 - b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
 - c. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
 - d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- Dalam pasal 21 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- b. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- c. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- Dalam pasal 22 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :
 - a. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.

- b. Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - d. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- Dalam pasal 23 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :
 - a. Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
 - b. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

- c. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota

2.2.3.2 Pelaksanaan

- Dalam pasal 24 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan:
 - a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat
 - d. harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Dalam pasal 25 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :
 - a. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
 - b. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
 - c. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota
- Dalam pasal 26 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :
 - a. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
 - b.

- c. Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- d. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- Dalam pasal 27 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :
 - a. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
 - b. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
 - c. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
- Dalam pasal 28 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :
-

- a. Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- Dalam pasal 29 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :
Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - c. Lampiran bukti transaksi
- Dalam pasal 30 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :
 - 1. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;

- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- 2. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- 3. Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- Dalam pasal 31 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam pasal 32 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

- Dalam pasal 33 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :
 1. Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 2. Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

3. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.
 - Dalam pasal 34 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :
 - a. Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
 - b. Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

2.2.3.3 Penatausahaan

- Dalam pasal 35 tentang Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :
 - a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
 - b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

- d. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Dalam pasal 36 tentang Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank

2.2.3.4 Pelaporan

- Dalam pasal 37 tentang Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan:
 1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
 2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
 3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

4. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya

2.2.3.5 Pertanggungjawaban

- Dalam pasal 38 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 1. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 2. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan

3. format Laporan Program Pemerintah dan
Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

- Dalam pasal 39 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Dalam pasal 40 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

- b. Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

- Dalam pasal 41 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

- Dalam pasal 42 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

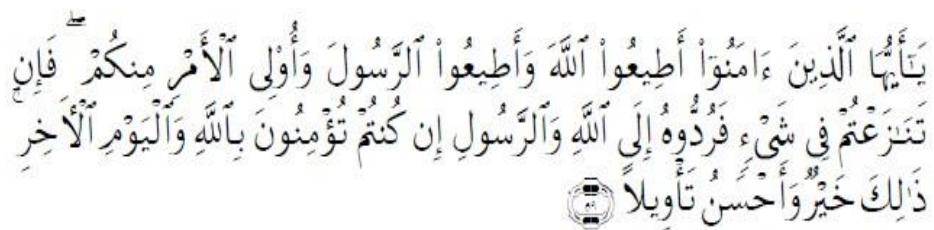
Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 37 dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

- Dalam pasal 43 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

2.2.3.6 Integritas Islam Dalam Pengelolaan Dana Desa

Proses Pengelolaan Dana Desa harus dilandasi dengan dasar amanah dan adil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Dan sudah dijelaskan difirmankan dalam surah An-Nisa/4:59 yang berbunyi:



Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbedapendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa/4:59).

Ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwewenang menetapkan hukum. Secara berurutan dinyatakan Nya; *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah* dalam perintah perintahnya yang tercantum dalam al-Qur'an dan *taatilah Rasulnya*, yakni Muhammad saw. Dalam segala macam perintahnya baik perintah melakukan sesuatu maupun perintah

untuk tidak melakukannya sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sahih, dan perkenankan juga perintah *ulilamri*, yakni yang berwenang menangani urusan urusankamu selama mereka merupakan bagian di antara kamu wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasulnya. Maka jika kamu tarik-menarik yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al-Qur'an, dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang shahih, maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul. Yang kamu temukan dalam sunnahnya jika kamu benar benar beriman secara mantap dan besinambung kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, sedang selainnya buruk atau memiliki kekurangan, dan disamping itu, ia juga lebih baik akhirnya baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.

Adapun bila perintah taat diulangi seperti ayat di atas, maka di situ Rasulullah SAW memiliki wewenang serta hak untuk ditaati walaupun tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an. Itu sebabnya perintah taat kepada ulil amri tidak disertai dengan kata taatilah karena mereka tidak memiliki hak untuk ditaati bila ketaatan kepada mereka bertentangan dengan ketaatan kepada Allah SWT atau Rasulullah SAW. Pendapat ulama berbeda-beda tentang makna kata *uli al-amr*. Dari segi bahasa, *uli* adalah bentuk jamak dari *waliy* yang berarti *pemilik* atau *yang mengurus*

dan *menguasai*. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak, sedang kata *al-amr* adalah *perintah* dan *urusan*. Dengan demikian, *uli al-amr* adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan.

Dalam ayat ini ditetapkan kewajiban atas masyarakat untuk taat kepada ulil amri, walaupun sekali lagi harus digaris bawahi penegasan Rasul. bahwa: *la tha'ata limakhlūqin fi ma'shiyati al-khaliq*/tidak dibenarkan taat kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq. Tetapi, bila ketaatan kepada ulil amri tidak mengandung atau mengakibatkan kedurhakaan, maka mereka wajib ditaati, walaupun perintah tersebut tidak berkenan di hati yang diperintah. Taat dalam bahasa AlQur'an berarti tunduk menerima secara tulus dan atau menemani. Ini berarti ketaatan dimaksud bukan sekadar melaksanakan apa yang diperintahkan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam upaya yang dilakukan oleh penguasa untuk mendukung usaha-usaha pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks inilah Nabi Muhammad SAW. bersabda: *ad-dinu an-nashihah/agama adalah nasihat*. Ketika para sahabat bertanya: "Untuk siapa?" Nabi SAW. antara lain menjawab, "Untuk para pemimpin kaum muslimin, dan khalayak ramai mereka" (HR. Muslim melalui Abu Ruqayyah Tamim Ibn Ausad). Nasihat dimaksud adalah dukungan positif termasuk control sosial demi suksesnya tugas-tugas yang mereka emban. Ayat ini juga

mengisyaratkan berbagai lembaga yang hendaknya diwujudkan umat Islam untuk menangani urusan mereka, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika diutus oleh Nabi SAW. memimpin suatu pasukan. Diriwayatkan oleh al Bukhari dan lainnya yang bersumber dari Ibnu Abbas dengan riwayat ringkas.

Menurut Imam Ad Dawudi riwayat tersebut menyalah gunakan nama Ibnu Abbas, karena cerita mengenai Abdullah bin Hudzafah itu adalah sebagai berikut: “disaat Abdullah marah-marah pada pasukannya ia menyalakan unggun api, dan memerintahkan pasukannya untuk terjun ke dalamnya. Pada waktu itu sebagian menolak dan sebagian lagi hampir menerjunkan diri ke dalam api”. Sekiranya ayat ini turun sebelum peristiwa Abdullah mengapa ayat ini dikhususkan untuk mentaati Abdullah bin Hudzafah saja, sedang pada waktu lainnya tidak. Dan sekiranya ayat ini sesudahnya, maka berdasarkan hadist yang telah mereka ketahui, yang wajib ditaati itu ialah di dalam ma'ruf (kebaikan) dan tidak pantas dikatakan kepada mereka mengapa ia tidak taat.

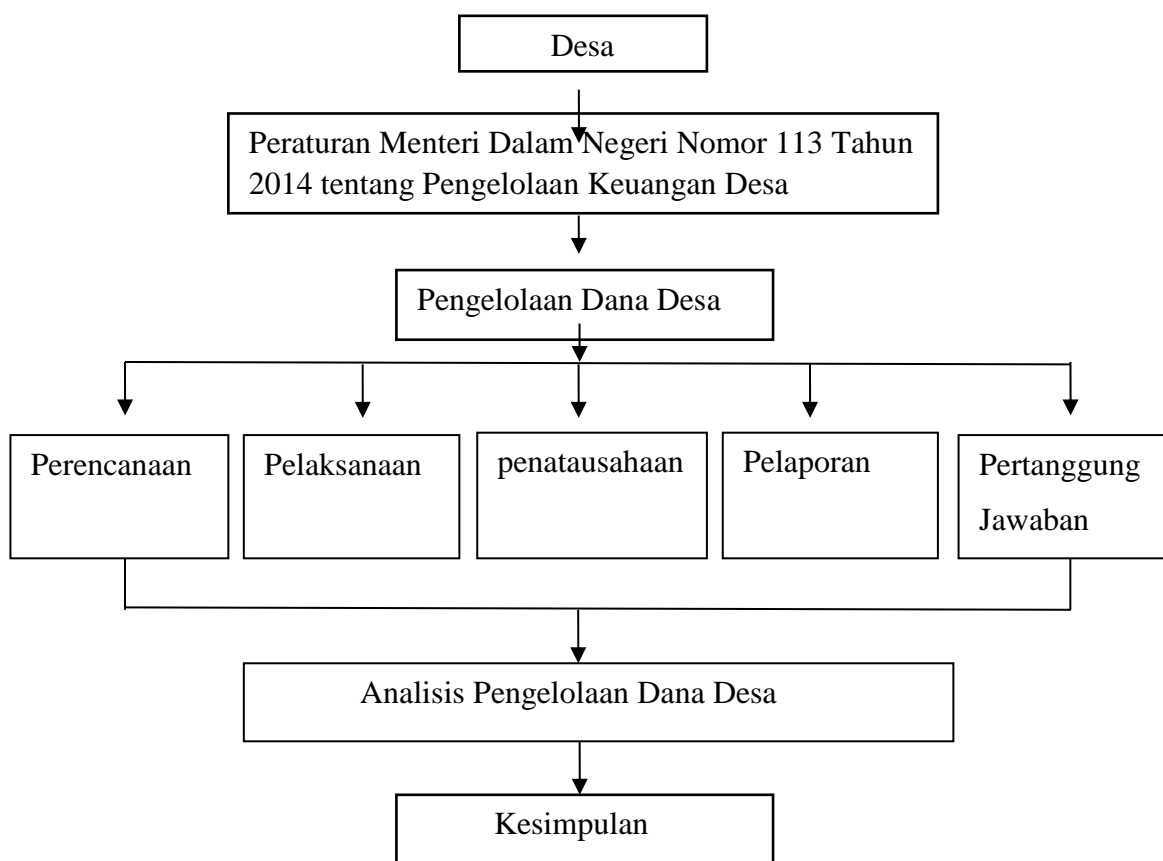
Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat bahwa maksud kisah Abdullah bin Hudzafah, munasabah disangkut pautkan dengan alasan turunnya ayat ini, karena dalam kisah itu dituliskan adanya perbatasan antara taat pada perintah (pimpinan) dan menolak perintah, untuk terjun ke dalam api. Di saat itu mereka perlu akan petunjuk apa yang harus mereka

lakukan. Ayat ini turun memberikan petunjuk kepada mereka apabila berbantahan hendaknya kembali kepada Allah dan Rasul-Nya.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian pustaka serta fakta dan kondisi yang ada pada Desa Bulangan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, maka dapat disusun kerangka berfikir mengenai “Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Desa Bulangan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik” sebagai berikut

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Pengelolaan Dana Desa



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian atas masalah masalah yang berupa fakta-fakta dan fenomena yang terjadi saat ini. Dilihat dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Sangadji dan Sopiah (2010). Sedangkan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sugiyono (2011).

Dalam penulisan penelitian ini, penulis berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan metode **penelitian deskriptif kualitatif**.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Bulangan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah beberapa perangkat desa yang menjadi operator serta ikut andil dalam pengelolaan Dana Desa. Adapun beberapa perangkat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Bulangan

2. Sekretaris Desa Bulangan

3. Bendahara Desa Bulangan

3.4 Data dan Jenis Data

Data dan jenis data yang digunakan peneliti terbagi menjadi dua bagian. Yaitu jenis data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara. Sedangkan data tambahan (data sekunder) adalah sumber data yang berasal dari bentuk dokumen-dokumen dan lain lain (Moleong, 2011). Adapun 2 jenis data di atas adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer yang berupa wawancara langsung dengan Kepala Desa (Bpk. Mudhlohan), Sekertaris Desa (Bpk. Masbukhin), Bendahara Desa (Ibu. Evi Rohmawati), melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh oleh penulis dari Desa Bulangan berupa Peraturan Desa Bulangan Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019, RAB Tahun Anggaran 2019, SPP Tahun Anggaran 2019, Buku Kas Pembantu Kegiatan Tahun Anggaran 2019, pernyataan Tanggungjawab Belanja Tahun 2019, Kwitansi Tahun Anggaran 2019, Buku Bank Desa Tahun Anggaran 2019, Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2019, Buku Ka Pembantu Pajak Tahun Anggaran 2019, Laporan Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019, Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2019.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Menurut Herdiansyah (2010:118) wawancara adalah aturan, tanggungjawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan aparat desa lainnya seperti bendahara desa, ketua TPK dan lain lainnya yang mempunyai data tentang pengelolaan dana desa di desa yang akan diteliti.

2. Observasi

Menurut Herdiansyah (2010:131) Dalam penelitian ini, observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti hal hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumen membantu memverifikasi ejaan dan judul atau nama yang benar dari organisasi-organisasi yang telah disinggung dalam wawancara. Dokumen dapat menambah rincian spesifik guna mendukung informasi dari sumber lain dan inferensi dapat dibuat dari dokumen dengan tujuan menjadikan dokumen tersebut sebagai rambu rambu untuk penelitian selanjutnya Yin (2014).

Hasil penelitian dari observasi akan lebih terpercaya apabila didukung dengan adanya bukti fisik seperti dokumen dokumen terkait atas pengelolaan dana desa.

3.6 Analisis Data

Analisis data (Sugiyono, 2012), merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan telah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam pengumpulan data harus sesuai dengan pengelolaan dana desa agar dapat diteliti, selanjutnya dilakukan analisis dan ditarik kesimpulan mengenai pengelolaan dana desa pada Desa Bulangan yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dan dibandingkan apakah pengelolaan dana desa pada Desa Bulangan sudah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data Dan Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Bulangan

Desa Bulangan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik bagian Barat. Secara geografis, wilayah Desa Bulangan terletak pada ketinggian ± 5 km di atas permukaan, dengan koordinat $112^{\circ}28'27''$ T Bujur Timur dan $06^{\circ}59'60''$ S Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah tersebut sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Wonokerto, Kecamatan Dukun
- b. Sebelah Selatan : Desa Gedongkedoan, Kecamatan Dukun
- c. Sebelah Timur : Desa Bangeran, Kecamatan Dukun
- d. Sebelah Barat : Desa Sawo, Kecamatan Dukun

Secara administratif pemerintahan, Desa Bulangan yang mencakup 3 Rukun Warga (RW) dan 12 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2021 Sebagaimana penuturan dari Ibu Evi Rohmawati, salah satu Perangkat Desa di Desa Bulangan berikut:

"Desa Bulangan ini terbagi menjadi 3 (tiga) RW dan 12 (dua belas) RT. Desa Bulangan terletak diperbatasan wilayah Kabupaten Gresik sebelah barat yang berada disebelah utara aliran Bengawan Solo dan berbatasan dengan Desa terakhir Kabupaten Gresik."

Desa Bulangan memiliki luas wilayah $3,84 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 2.200 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.117 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.083

jiwa. Struktur mata pencaharian desa ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini terbukti dari 220,78 dari sekian luas wilayah desa yang merupakan lahan persawahan. Begitu pula dengan sektor ekonomi lainnya seperti peternakan, perdagangan, perikanan, dan kehutanan yang berturut-turut mengikuti di bawahnya. Meskipun demikian, sektor industri kecil dan menengah juga mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pun dengan adanya profesi jasa selain dari sektor pertanian, seperti guru, sopir, PNS, TNI/POLRI, TKI, dan sebagainya.

Berdasarkan data mengenai perdagangan yang bersumber dari monografi desa pada tahun 2019, di Desa Bulangan terdapat 1 pasar tradisional, 21 toko/kios, 16 peracangan, dan 4 warung. Sedangkan menurut Format Isian Data dan Potensi Desa Bulangan pada tahun yang sama diperoleh data adanya 1 pasar tradisoinal dan 21 unit usaha toko/kios, tanpa membedakan atau mengkualifikasikan jenis toko. Adapun pada awal tahun 2020 berdasarkan penghitungan manual yang dilakukan oleh peneliti terdapat hampir semua toko yang masih aktif dan melakukan kegiatan jual beli.

4.1.2 Visi Dan Misi Desa Bulangan

- Visi Desa Bulangan

Berjuang Bersama Rakyat dan Untuk Rakyat, Rakyat Sejahtera,
Negara Menjadi Aman dan Sentosa

- Misi Desa Bulangan

1. Mewujudkan masyarakat keamanan dan ketertiban di lingkungan

desa Bulangan

2. Mewujudkan tata kelola yang bersih, inovatif, transparan, dan akuntabel serta memberikan pelayanan masyarakat yang cepat dan efektif
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga, kebudayaan di desa
4. Membangun sistem pertanian desa yang berorientasi pada penguatan ekonomi
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan, kebersihan desa serta mengusahakan jaminan kesehatan melalui program pemerintah
6. Berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal
7. Memberikan kesempatan pada semua lapisan masyarakat
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan BUMDes dan program pemberdayaan lain untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa
9. Meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal
10. Menjaga harmonisasi di lingkungan masyarakat berdasarkan nilai sosial, budaya dan agama.

4.1.3 Kebijakan Pembangunan Desa

a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Pembangunan Desa Bulangan selama 5 tahun kedepan difokuskan pada

prioritas pelayanan kebutuhan masyarakat serta pembangunan Desa Bulangan. Hal tersebut dilakukan dari penggalian gagasan sampai tersusunnya prioritas dalam musyawarah desa mengenai perencanaan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mengacu dan berpedoman pada dokumen RPJM Desa.

b. Potensi dan Masalah

Potensi yang ada di Desa Bulangan dilihat dari sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) sebagai berikut: SDM (siklus dan ritme kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu yang relatif teratur. Terjaga adat istiadatnya, salah satu contohnya yaitu keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dimana masih kentalnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat dan sumber daya perempuan usia produktif, swadaya, kebiasaan bercocok tanam, dan mebel) dan SDA(bidang pertanian, kehutanan, peternakan, industri rumah tangga dan pertambangan). Sedangkan permasalahan yang ada di Desa Bulangan adalah tingkat pengangguran yang cukup tinggi, minimnya industri, dan pertambangan yang rendah. Walau sebenarnya potensi pertambangan di Desa Bulangan cukup tinggi. Akan tetapi warga desa melarang adanya pertambangan dalam desa yang pada akhirnya berdampak pada kerusakan pada jalan desa.

Dengan melihat adanya potensi dan masalah yang dihadapi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi Desa Bulangan belum digunakan dengan optimal sehingga masih banyak penduduk desa yang hidup kekurangan. Disamping itu, sebagian besar penduduk Desa Bulangan memiliki lahan diluar

desa Desa Bulangan, sehingga hal tersebut juga dapat membantu perekonomian penduduk masyarakat Desa

c. Program Pembangunan Desa

Desa Bulangan dalam menghadapi permasalahan utama yaitu pengangguran maka pemerintah Desa Bulangan berupaya untuk lebih menfokuskan pada peningkatan ekonomi dengan memperbaiki pola tanam dalam bidang pertanian. Salah satu upaya ialah mengatasi kelangkaan pupuk dengan menggunakan pupuk organik, membuat kelompok tani untuk membantu para petani yang ada di Desa Bulangan agar dapat bercocok tanam sehingga dapat mengurangi pengangguran dengan cara menyediakan bibit yang akan di tanam oleh petani.

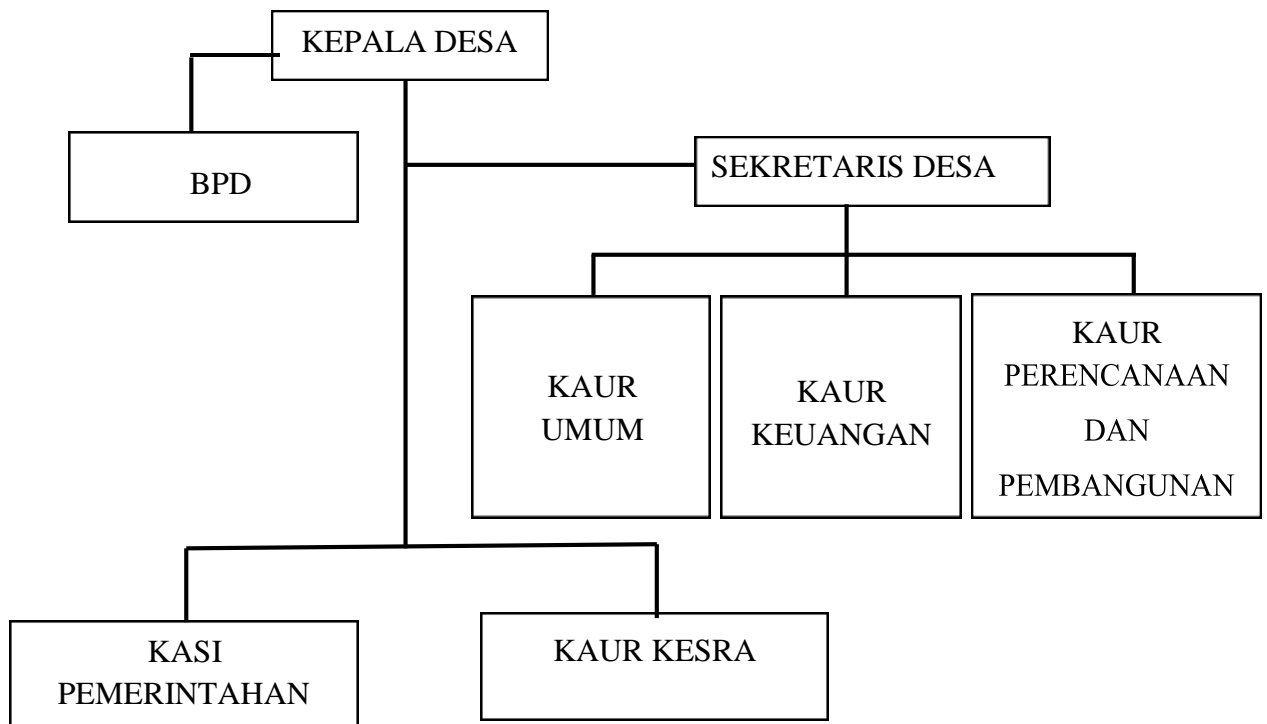
Dalam memperlancar perekonomian sehingga dapat berjalan dengan optimal pemerintah Desa Bulangan juga membangun sarana prasaran yaitu dengan memperbaiki aspal jalan menuju lahan pertanian, Membuat tembok penahan tanah, memperbaiki rumah yang sudah tidak layak huni, membuat jalan rabat setiap gang, membuat saluran drainase serta memberikan bantuan berupa alat surving, mesin jahit dan alat pembuatan mebel. Selain itu juga dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat desa maka pemerintah desa membangun poliklinik desa, mengadakan posyandu atau penimbangan balita, mencegah demam berdarah dengan fogging, perbaikan sarana MCK(mandi, cuci, kakus) dan menyediakan air bersih.

d. Strategi Pencapaian

Perencanaan suatu pembangunan sebaiknya dilakukan pada tingkat pusat sampai tingkat desa. Desa membutuhkan suatu perencanaan yang matang dengan menggunakan strategi yang mampu dikembangkan menuju arah pembangunan yang lebih baik terutama menitikfokuskan pada pemikiran primitif masyarakat desa tentang pembangunan desa. Sehingga dalam menentukan strategi membutuhkan indikator guna dapat mencapai sasaran program secara maksimal, kebijakan yang di ambil oleh pemerintah desa haruslah berwawasan luas yang memikirkan kebutuhan orang banyak dan harus direncanakan secara optimal dan berkesinambungan.

4.1.4 Struktur Pemerintahan Desa Bulangan

Gambar 4.1



Sumber: Data Diolah, 2021

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bulangan

Tabel 4.2

Nama Pejabat Pemerintah Desa Bulangan

No	Nama	Jabatan
1	Mudlohan	Kepala Desa
2	Masbuhin, S.E., S.Pd.	Sekretaris Desa
3	Asfulatul Iailiya	Kaur Umum
4	Evi Rohmawati, S.Pd.	Kaur Keuangan
5	Nasihin	Kaur Perencanaan
6	Ahyaul Mustahlaftin	Kasi Pemerintahan
7	Mohammad Kaswan Al Hayyi	Kasi Kesejahteraan

Sumber: Data Diolah, 2021

Tabel 4.3
Nama Badan Permusyawaratan Desa Bulangan

No	Nama	Jabatan
1	Maji Aris	Ketua
2	Komari	Wakil Ketua
3	Jamaluddin	Sekretaris
4	Junaidi	Anggota
5	Siti Asiyah	Anggota
6	Rofikah	Anggota
7	Abdul Ghofar	Anggota

Sumber: Data Diolah, 2021

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Perencanaan Dana Desa

Menurut hasil wawancara dengan kaur perencanaan Desa Bulangan. Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, agenda kegiatan yang jelas. Pemerintah Desa Bulangan menyusun program yang dilaksanakan harus dapat meningkatkan bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. perencanaan dimulai dari musrenbang tingkat desa. Perencanaan pembangunan Desa meliputi: RPJMDesa dan RKPDesa.

Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah Desa telah menyelenggarakan musyawarah dengan mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di Desa. Musrenbang desa dilaksanakan 1 tahun sekali di bulan juli. Musrenbang dihadiri oleh BPD, Rt/Rw dan tokoh masyarakat sebagai perwakilan wilayah untuk menyampaikan kebutuhan yang ada di desa, sehingga nantinya dapat diprioritaskan kebutuhan masyarakat masing-masing wilayah.

Proses Perencanaan pembangunan dibuat dalam RKP Desa (Rencana Kegiatan Pembangunan) setelah itu dimuat dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja) untuk penyusunan APBDes yaitu Anggaran pendapatan dan belanja desa. APBDes merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

4.2.2 Proses Penyusunan dan Penetapan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bulangan Setelah RKPDesa Bulangan telah ditetapkan, maka dilanjutkan dengan proses penyusunan APBDesa. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses perencanaan APBDesa. APBDesa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa. Pada Desa Bulangan, proses penyusunan dan penetapan APBDesa yaitu: Perdes tentang APBDesa disusun bersama oleh Pemerintah Desa yakni Sekretaris Desa, Raperdes tentang APBDesa yang telah disusun disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Setelah raperdes tentang APBDesa disepakati, Raperdes tersebut disampaikan kepada Camat Dukun melalui pendamping Desa tingkat Kecamatan untuk dilakukan evaluasi. Kemudian dilakukan evaluasi oleh camat Dukun dan disampaikan kepada BPMD kabupaten Gresik. Setelah dilakukan evaluasi BPMD Gresik dan dinyatakan sesuai, maka APBDes ditetapkan oleh Bupati melalui camat dan perdes tentang APBDesa dapat diberlakukan.

4.2.3 Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa APBDesa Yang telah ditetapkan, Pemerintah Desa Bulangan segera melaksanakan rencana kerja Pemerintah Desa. Untuk pendanaan dalam pelaksanaan APBDesa, Pemerintah Desa Bulangan melakukan pengajuan permohonan penyaluran dan pencairan dana kepada pemerintah kabupaten Gresik melalui BPMD.

Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan Desa. Sumber pendapatan Desa Bulangan bersumber dari: Dana Desa (APBN), ALokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gresik. Penerimaan pendapatan Desa Bulangan hanya berasal dari pendapatan transfer Desa, penerimaan tersebut telah dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Desa Bulangan saat ini tidak memiliki pendapatan asli Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sudah berjalan. Sehingga pendapatan desa tidak sepenuhnya hanya berasal dari pendapatan transfer desa yang difungsikan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pembinaan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4.4
Pendapatan Dana Desa Tahun 2019

No	Uraian	Pendapatan APBDesa
1	Pendapatan Asli Desa	72.000.000
2	Pendapatan Transfer	1.359.740.000
3	Pendapatan Lain Lain	1.650.685,00
	Belanja	
4	Bidang Pelaksanaan pemerintah desa	517.609.314,02
	1. Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan opsional pemerintah Desa	371.905.685,02
	2. Penyediaan sarana prasarana pemerintah Desa	45.021.629,00
	3. Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	5.803.000,00
	4. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	81.879.000,00
	5. Sub bidang pertahanan	6.000.000,00
5	Bidang Pelaksanaan pembangunan desa	862.801.000,00
	1. Sub bidang pendidikan	42.300.000,00
	2. Sub bidang kesehatan	264.800.000,00
	3. Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	420.701.000,00
	4. Sub bidang kawasan permukiman	135.000.000,00
6	Bidang pembinaan kemasyarakatan	61.300.000,00
	1. Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	7.800.000,00
	2. Sub bidang kebudayaan dan keagamaan	20.500.000,00
	3. Sub bidang kepemudaan dan olahraga	21.000.000,00
	4. Sub bidang kelembagaan masyarakat	12.000.000,00
7	Bid. Pemberdayaan masyarakat	40.000.000,00
	1. Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	20.000.000,00
	2. Sub bidang perdagangan dan perindustrian	20.000.000,00

Sumber: Data diolah, 2021

Pendapatan transfer Desa (APBN) Desa Bulangan sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan pembangunan fisik. Dana Desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Sedangkan pendapatan dari hasil pajak dan retribusi daerah dialokasikan untuk pembangunan dan pembinaan masyarakat desa.

Mekanisme penyaluran dan pencairan dana Desa (APBN), menurut Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yaitu: Kepala Desa melakukan pengajuan permohonan pencairan dengan dilampiri rencana pembangunan Dana Desa, dan bagi hasil pajak & retribusi daerah, Pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, laporan penggunaan dana desa, dan surat pertanggungjawaban (SPJ). Permohonan tersebut diperiksa oleh Camat Dukun. Setelah permohonan pencairan diperiksa selanjutnya, Camat mengajukan rekomendasi penyaluran Dana Desa kepada Bupati Gresik Melalui BPMPD dengan melampirkan Rencana Kerja dana Desa, ADD, dan Bagi Hasil Pajak Retribusi, Laporan penggunaan dana Desa, surat pertanggungjawaban (SPJ) dan rekomendasi diterbitkan apabila dokumen permohonan penyaluran pencairan telah lengkap dan benar. Berdasarkan rekomendasi Camat, BPMD selanjutnya meneruskan permohonan penyaluran dan pencairan dana Desa kepada kepala BPKAD setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati. Kepala BPKAD menyalurkan Dana Desa dari kas Daerah ke rekening kas Desa. Pencairan dana Desa, ADD, dan Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing Desa setelah mendapatkan pemberitahuan tertentu dari Kepala BPMPD

dan diterbitkan rekomendasi oleh Camat. Pencairan dana Desa pada Bank yang ditunjuk dilaksanakan oleh Bendahara Desa dengan menunjukkan bukti dan surat kuasa dari Kepala Desa.

Mekanisme penyaluran dan pencairan Dana Desa, pada Desa Bulangan yaitu: Kepala Desa melakukan pengajuan permohonan pencairan dengan dilampirkan rencana penggunaan dana Desa, permohonan tersebut diperiksa oleh Camat melalui Pendamping Desa Kecamatan, setelah permohonan pencairan diperiksa selanjutnya, Camat mengajukan rekomendasi penyaluran dan pencairan Dana Desa kepada Bupati melalui BPMPD. Berdasarkan rekomendasi Camat tersebut, kemudian BPMPD meneruskan penyaluran Dana Desa kepada BPKAD setelah mendapat persetujuan dari Bupati. Kemudian BPKAD menyalurkan dana desa dari kas daerah ke rekening kas desa.

4.2.4 Penatausahaan dan Penerimaan Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Penatausahaan penerimaan dana di desa Bulangan dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Dalam pencatatan penerimaan, Bendahara Desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku pembantu bank. Dalam pencatatanya Bendahara Desa telah melakukan pencatatan atas penerimaan yang bersifat transfer. Pada Tahun 2019 Pemerintahan Desa Bulangan penatausahaan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kuangan Desa (SISKUEDES) yang berasal dari BPKP.

4.2.5 Penatausahaan Pengeluaran/Belanja Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Keuangan Beliau mengatakan Penatausahaan pengeluaran di Desa Bulangan dilaksanakan oleh

Bendahara Desa. Dalam pencatatan pengeluaran, Bendahara desa menggunakan Buku Pembantu Bank, dan Buku Kas Umum. Segala pengeluaran/belanja desa yang dilakukan Desa Bulangan bersifat tunai. Pengeluaran/belanja desa yang dikeluarkan oleh bendahara desa telah dibuatkan kwitansi pengeluaran. Penausahaan terkait belanja desa, telah dilakukan pengumpulan berupa bukti tanda terima atau nota dan dicatat pada buku kas Umum. Bendahara Desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi pengeluaran dilakukan ke dalam buku pembantu pajak.

Pengadaan barang atau jasa dilakukan melalui swkelola dengan memberdayakan tenaga ahli yang ada di desa, dan memaksimalkan penggunaan material atau bahan dari wilayah setempat. Swkelola tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi lokal desa, untuk dana yang bersumber dari dana Desa (APBN) dilaksanakan oleh Tim Pengelola Keuangan (TPK). TPK terdiri dari unsur Pemerintahan Desa dan unsur masyarakat Desa. Pembentukan TPK melalui surat keputusan (SK) Kepala Desa. TPK dibentuk untuk melaksanakan program kegiatan yang bersumber dari dana desa (APBN).

Setelah TPK dibentuk dan APBD Desa telah ditetapkan maka langkah awal yang dilakukan TPK Desa Bulangan yaitu membuat RAB sebagai salah satu dokumen pengajuan pendanaan. Setelah RAB dibuat, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Kepala Desa, setelah dilakukan verifikasi, RAB disetujui oleh Kepala Desa dan TPK melakukan proses kegiatan sesuai dengan RAB tersebut.

4.2.6 Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara Desa Bulangan melakukan tutup buku dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir bulan, laporan pertanggungjawaban dibuat dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ), SPJ ini termasuk sebagai persyaratan untuk penyaluran dana desa.

4.2.7 Analisis Pengelolahan Dana Desa

Tabel 4.5
Analisis Perbandingan Kesesuaian Pengelolahan Dana Desa
Bulangan Dengan Permendagri

NO	Tahap pengelolaan dana desa	Penyesuaian		Sesuai/ Tidak Sesuai	Keterangan
		Permendagri No 20 Tahun 2018	Pengelolaan Dana Desa Bulangan		
1	Perencanaan	Permendagri No.60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) menyatakan kegiatan dan penyediaan dananya tidak dapat dilakukan dalam satu tahun anggaran pemerintah desa membentuk dana desa cadangan untuk membiayainya.	Pemerintah desa menggunakan dana cadangan pada kegiatan yang dananya lebih dari satu tahun anggaran	Sesuai	
		Pasal 43 ayat (1) sekertaris menyusun rancangan dalam rancangan kegiatan pembangunan desa (RKP)	Sekertaris desa Bulangan melakukan penyusunan RKP kemudian dimuat dalam RAB	Sesuai	

		setelah itu dimuat dalam rencana anggaran belanja untuk menyusun anggaran pendapatan belanja desaa			
		Pasal 32 ayat (3) sekertaris menyampaikan rancangan Dana desa kepada kepala desa agar dibahas dan disepakati secara bersma BPD dalam jangka waktu paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	Dana desa telah disepakati pada hari senin, 15 Oktober dalam rapat pembahasan tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP DESA)	Sesuai	Raperdes telah dimusyawarak an dan disepakati oleh BPD dan Kepala Desa .
		Pasal 32 ayat (2) sekertaris desa menyampaikan n rancangan perdes tentang dana desa kepada kepal desa	Dana desa telah disepakati pada hari senin, 15 Oktober dalam rapat pembahasan tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP DESA)	Sesuai	Raperdes telah dimusyawarak an dan disepakati oleh BPD dan Kepala Desa .
		Pasal 32 ayat (2) sekertaris desa menyampaikan n rancangan perdes tentang dana desa kepada kepal desa	Sekertaris desa Bulangan telah menyampaikan raperdes tantang dana desa kepada kepala desa menyerahkan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati.	Sesuai	
		Pasal 34 ayat (1) Raperdes	Kepala Desa Bulangan	Sesuai	Dokumen yang disertakan

		tentang RAB sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati walikota melalui camat atau sebutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	menyampaikan Raperdes kepada camat sebelum 3 hari sejak disepakati bersama dengan BPD		dalam raperdes antara lain bercerita tentang hasil musyawarah dengan BPD, surat pengantar, rancangan perkades, perdes tentang RKP.
2	Pelaksanaan	Pasal 54 ayat (3) kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku pembantu	Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam kas umum dan buku pembantu	Sesuai	Kaur keuangan mengimput pengeluaran dan menasukan desa di buku pembantu pajak.
		Pasal 48 kaur keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui.	Kaur keuangan telah menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui.	Sesuai	Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu dengan jumlah tertentu untuk kebutuhan operasional
		Pasal 44 menyatakan nomor rekening kas desa dilaporkan kepada Bupati atau Wali Kota untuk dilaporkan pada menteri melalui	Kepala Desa Bulangan melaporkan nomor rekening kas desa pada Bupati atau Wali Kota setelah pembuatan Rekening desa.	Sesuai	Pelaporan nomor rekening kas desa untuk pengendalian dana transfer dan kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai

		Direktur Jendral Bina Pemerintah Desa			
		Pasal 43 pelaksanaan pengelolaan Dana desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota dengan spesimen tanda tangan kepala desa atau kaur keuangan.	Kepala Desa Bulangan serta kaur keuangan membuat rekening desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Kepala desa membuat rekening di bank Jatim cabang Cabang Karanggeneng.	Sesuai	
3	Penatausahaan	Pasal 63 ayat (1) penatausahaan dana desa dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan	Sekretaris desa mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran	Tidak Sesuai	Kaur keuangan tidak cukup memahami proses penatausahaan.
		Pasal 64 ayat (1) kaur keuangan wajib membuat buku pembantu pajak kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak.	Sekertaris desa membuat buku pembantu kas umum, buku pembantu kas tunai dan buku pembantu kegiatan serta buku pembantu pajak.	Tidak Sesuai	Kaur keuangan kurang cukup memahami proses membuat buku pembantu pajak.
4	Pelaporan	Permendagri No.20 Tahun	Kepala desa melaporkan	Sesuai	Laporan yang dimaksud

		2018 Pasal 60 Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan semester pertama dan semester akhir kepada bupati/walikota.	laporan realisasi semester pertama dan kedua ke Kabupaten Dukun		adalah laporan realisasi anggaran
5	Pertanggung jawaban	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran	Laporan pertanggungjawaban dilakukan setiap akhir tahun anggaran oleh kepala desa sesuai dengan Perdes	Sesuai	

Sumber : Data Diolah, 2021

Tahapan pengelolaan Dana desa di Desa Bulangan Kecamatan Dukun Kabupaten

Gresik:

1. Tahap Perencanaan

Tahap Perencanaan Proses perencanaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2014, terlebih dahulu sekretaris menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa agar dibahas dan disepakati secara bersama Badan Permusyawaratan Desa jangka waktu paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Setelah rancangan tersebut dibahas dan disepakati oleh kepala desadan Badan Permusyawaratan Desa secara bersama, maka rancangan tersebut disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak

disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Setelah rancangan tersebut disepakati oleh Bupati/Walikota selanjutnya ia mendelegasikan hasil evaluasi tersebut kepada kepala desa melalui camat untuk ditetapkan sebagai APBDesa. Jika hasil evaluasi tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, dan akan ditetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa oleh kepala desa, maka Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

Hal ini sesuai dengan Perwujudan terkait pengelolaan dana desa yang dijalankan oleh pemerintah Desa Bulangan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dapat dilihat melalui penerapan prinsip Perencanaan pembangunan dibuat dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP) setelah itu dimuat dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di

wilayahnya maka peraturan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Setiap Pendapatan desa didukung oleh bukti lengkap dan sah. Kepala Desa wajib mengentinsifkan pemungutan pendapatan Desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung bukti lengkap dan sah. Bukti tersebut didapatkan dari pengesahan oleh sekretaris desa dan sepengetahuan Kepala Desa. Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa.

2. Tahap pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa berisi tentang semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka menjalankan pelaksanaan kewenangan Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati atau Walikota sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 43 sampai 62. Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 55 telah menjelaskan bahwa pelaksanaan pengajuan SPP ke kepala Desa dengan syarat sudah adanya lampiran bukti penerimaan barang atau jasa ditempat dan pernyataan tanggungjawab belanja. Apabila telah dilengkapi persyaratan atau berkas yang telah diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disetujui oleh kepala Desa diserahkan kepada kaur keuangan Desa untuk melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP . Kaur keuangan Desa mencatat pembayaran sebagai pengeluaran Desa. Sistem pelaksanaan keuangan

Desa berdasarkan pemendagri disebut dana belanja tak terduga yang mana pelaporannya paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan.

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka peraturan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Setiap Pendapatan desa didukung oleh bukti lengkap dan sah. Kepala Desa wajib mengentinsifkan pemungutan pendapatan Desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung bukti lengkap dan sah. Bukti tersebut didapatkan dari pengesahan oleh sekretaris desa dan sepengetahuan Kepala Desa. Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa.

Desa Bulangan sendiri sudah melakukan tahap pelaksanaan sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018. Yang mana berbeda dengan Permendagri 113 Tahun 2014 yang ada sistem “Nalangi” dimana sebelum data dari daerah cair maka bisa menggunakan dana cadangan. Sedangkan pada Pemendagri 20 Tahun 2018 pemerintah Desa tidak boleh melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Desa sebelum dana cair jadi dalam hal ini dalam pelaksanaanya hanya dapat dilakukan saat dana telah dicairkan. Dalam pencairan dana sendiri di Desa Bulangan belum pernah

mengalami keterlambatan pencairan dana Desa dari daerah sehingga pelaksanaannya bisa dijalankan tepat waktu.

3. Tahap Penatausahaan

Tahap Penatausahaan keuangan Desa selanjutnya yaitu tahap penatausahaan yang mana dalam Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu kewajiban kaur keuangan setiap akhir bulan pada penerimaan dan pengeluaran kas Desa sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. yang mana kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak (Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 64). Pada tahap penatausahaan ini kaur keuangan sekaligus pelaksana fungsi kebendaharaan. Karena dalam pembuatan laporan-laporan bulanan yang digunakan untuk pertanggungjawaban sudah dikerjakan di dalam sistem dengan output berupa penerimaan Desa dan SPP Definitif pada tahap pelaksanaan. Pada tahap penatausahaan

Akar permasalahan yaitu kurangnya pengetahuan kaur keuangan dalam pengelolaan penatausahaan, sebagai fungsi kebendaharaan kaur keuangan melimpahkan pengelolaan penatausahaan kepada sekretaris desa. Hal ini tidak sesuai dengan tugas dan fungsi kaur keuangan dimana tugas kaur keuangan yaitu mengurus seluruh urusan administrasi dan sumber sumber pendapatan serta pengeluaran. Sedangkan tugas dan fungsi sekretaris desa adalah berkedudukan sebagai pemmpin sekretariat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Adapun fungsi sekretaris desa dalam urusan keuangan ialah sebagai kordinator dan

verifikasi administrasi keuangan bukan mengelola seluruh bidang keuangan. Hal tersebut mengakibatkan kinerja pemerintahan desa kurang efektif dan akan berdampak pula pada pengelolaan keuangan desa Bulangan.

4. Tahap pelaporan

Tahap Pelaporan realisasi pelaksanaan APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi a disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

4.3 Integrasi Islam Dalam Pengelolaan Dana Desa

Proses Pengelolaan Dana Desa harus dilandasi dengan dasar amanah dan adil dalam menjalankan tugas, di dalam Islam dikemukakan prinsip-prinsip tentang pemerintahan, sebagaimana perintah Allah mengenai ulil amri (penguasa), seperti difirmankan dalam surah An- Nisa/4: 59 menjelaskan memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwewenang menetapkan hukum. Secara berurutan dinyatakan Nya; *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam al-Qur'an dan taatilah Rasul-Nya*, yakni Muhammad saw. dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnah pnya yang sah, *dan perkenankanjuga perintah ulil amri*, yakni yang berwewenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian *di antara kamu* wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. *Maka jika kamu tarik-menarik*, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al- Qur'an, dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang shahih, *maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul saw.* yang kamu temukan dalam sunnahnya, *jika kamu benar-benar beriman* secara mantap dan besinambung *kepada Allah dan hari Kemudian.* Yang demikian itu, yakni sumber hukum ini adalah *baik* lagi sempurna, sedang selainnya buruk-atau memiliki kekurangan, *dan* di samping itu, ia juga *lebih baik akhiratnya*, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.

Q.S Az-Zumar ayat 18, Q.S Az-Zalzalah ayat 7-8 . Adapun makna dan tafsir dari kedua ayat tersebut menjelaskan tafsir Al-Muyassar (Kementerian Agama Saudi Arabia) bahwa orang-orang yang memiliki akal sehat dengan mendengarkan perkataan dan memilah-milah antara yang baik dan buruk, yaitu dapat menimbang informasi yang baik maupun yang buruk. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi laporan keuangan yang andal serta terpercaya. Tafsir Al-Muyassar barangsiapa yang melakukan kebaikan atau keburukan seberat semut kecil maka dia akan mendapatkan balasan (hukuman) di Akhirat. Sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah desa untuk amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam setiap proses pengelolaan keuangan.

Al Imam Ibnu al Atsir rahimahullah berkata, amanah bisa bermakna ketaatan, ibadah, titipan, kepercayaan, dan jaminan keamanan, dan sudah dijelaskan dalam perspektif ayat Al quran surat An Nisa ayat 58 dari kandungan ayat diatas maka hubungan antara surat An Nisa ayat 58 dengan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel adalah terletak pada konsep dasar yang sama, untuk menyampaikan amanah kepada seseorang yang berhak menerimanya. Sedangkan pengertian akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah pertanggungjawaban aparat desa kepada masyarakat desa atas amanah yang dikuasakannya. Sehingga dalam pengelolaan keuangan desa senantiasa menjaga tanggungjawabnya secara jujur atas setiap amanah baik kepada Allah , manusia , dan lingkungan dan harus disesuaikan dengan peraturan hukum yang yaitu pembedagri nomor 20 tahun 2018 dan peraturan desa yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Seperti H.R.Muslim maka dari ketiga surah dan hadist tersebut,

dapat diketahui bahwa seorang muslim harus memiliki wawasan yang luas dan memiliki intelektual yang tinggi sehingga dapat diandalkan dan dipercaya dalam proses pengaplikasian system pengelolaan keuangan desa serta prosedur yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat terbuka kepada masyarakat dalam segala informasi , untuk mengantisipasi adanya penyelewengan anggaran dan tindak pidana oleh aparat desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Pengelolaan Dana Desa Bulangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pengelolaan Dana Desa Bulangan Kecamatan Dukun Tahun 2019, secara garis besar telah mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Permendagri No.60 Tahun 2018. Tiga tahap pengelolaan dana desa yaitu tahap perencanaan, pelaporan, dan Pertanggungjawaban Desa Bulangan dalam menerapkan sudah sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Meskipun dalam tahap penatausahaannya terdapat beberapa yang masih belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sehingga pengelolaan keuangan di Desa Bulangan belum optimal yaitu kaur keuangan kurang cukup memahami proses penatausahaan dana desa sebagai fungsi dari kebendaharaan kaur keuangan melimpahkan penatausahaan kepada sekertaris desa. Hal ini kurang sesuai dengan tugas dan fungsi kaur keuangan dimana tugas kaur keuangan yaitu mengurus seluruh urusan administrasi dan sumber sumber pendapatan serta pengeluaran, sedangkan tugas dan fungsi sekertaris desa adalah berkedudukan sebagi pemimpin sekertariat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran untuk selanjutnya adalah

Sumber daya manusia juga mempengaruhi proses dan kinerja pemerintahan desa sehingga alangkah baiknya jika desa memperbarui dan mengganti para aparatur desa dengan perangkat desa yang baru dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga ketidaksesuaian yang awalnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman perangkat desa dapat diatasi dengan memberi kesempatan kepada para pemuda desa atau para sarjanawan supaya dapat menerapkan ilmunya dan mengabdikan hidupnya untuk desa dan masyarakat desa. Dengan harapan dapat melakukan terobosan baru dan tidak “*stuck*” pada satu titik dan posisi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya

- Agustin, Henri; Arza, Fefri Indra; Mulyani, Erly; Fitra, Halkadri. 2017. Potret Pertanggung Jawaban dan Pelaporan dan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal WRA*. Vol 5, No 2. Hal 1019-1028
- Amin, dkk. 2012. "Pengelolaan Keuangan di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Tahun 2012". *Jurnal Kampus Bina Widya Universitas Riau*, 1-12.
- Anisa, dkk. 2017. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang". *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Volume 10 (2) Page 273 – 288.
- Ardianto dan Endry. 2016. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah". *Digital Library Universitas Lampung*.
- Arista, Maria Yovani Putu, dkk. 2015. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung)". *ojs Universitas Udayana*.
- Artana, I Made Adi, dkk. 2013. "Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur". *Jurnal Administrasi Negara Universitas Udayana*.
- Dewanti, Elsa Dwi Wahyu, dkk. 2016. "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)". *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.
- Diansari, Rani Eka. 2015. "Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung tahun 2013". *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Ferina, Ika Sasti, dkk. 2016. Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*.

- Herdiansyah dan Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Indonesia.
- Hidayat, Ferry. (04 April 2014). Misbakhun Minta BPKP Aktif Awasi Dana Desa. Warta Ekonomi. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 11:17 dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read176184/misbakhun-minta-bpkp-aktif-awasi-dana-desa.html>
- Husna, Saifatul dan Syukriy Abdullah. 2016. “Kesiapan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa secara Akuntabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 282-293.
- Hutami, Andi Siti Sri. 2017. “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)”. *skripsi*.
<https://www.kompasiana.com/rusda/5dae7643097f365c6d018ef2/ditjen-bina-pemdes-fasilitasi-132-desa-se-kabupaten-situbondo-dalam-pengelolaan-keuangan-dan-aset-desa-berbasis-aplikasi>
- Irawan, Nata. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mondale, T. Fitrawan, dkk. 2017. “Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)”. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung :Alfabeta.
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Yabbar, Rahman., Hamzah, Ardi. (2015). *Tata Kelola Pemerintahan
Desa*. Surabaya: Pustaka

Yin, Robert K.(2014). *Studi Kasus: Desain dan Metode* cet 13. Depok: Raja
Grafindo Persada.

www.anggaran.kemenkeu.go.id,2017

LAMPIRAN

Lampiran I

WAWANCARA

1. Tanggal 2 Februari 2020

Nama : Mudlohan

Jabatan : Kepala Desa

Pertanyaan : Bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Bulangan ?

Jawaban : Alhamdulillah sudah sesuai Permendagri dan berjalan dengan baik

Pertanyaan : Apakah pengelolaan keuangan Desa Karangsono sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?

Jawaban : Sudah sesuai karna pengelolaan dana desa harus mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Pertanyaan : Apa yang anda ketahui tentang dana desa pak ?

Jawaban : Dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau kota

Pertanyaan : Dana Desa digunakan untuk apa saja pak ?

Jawaban : Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pertanyaan : Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan dana desa?

Jawaban : Kepala desa menguasai kepada perangkat desa

Pertanyaan : Sebenarnya apasih tujuan dari Dana Desa pak ?

Jawaban : Tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan selain itu juga dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat desa, dengan memberikan lapangan pekerjaan seluas luasnya serta bisa dalam pembangunan atau pemberdayaan

Pertanyaan :Bagaimana dampak dana desa bagi kemajuan desa, menurunkan atau meningkat ?

Jawaban :Hasilnya cukup baik, selama ini desa mengalami peningkatan dan kemajuan

Pertanyaan :Bagaimana kinerja penyerapan dana desa?

Jawaban :seperti yang kita ketahui bahwa prioritas penggunaan dana desa terfokus pada 2 bidang yaitu bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan. Tetapi, masih ada juga yang menggunakan untuk 2 bidang yang lainnya.

2. Tanggal 3 Februari 2020

Nama : Evi Rohmawati

Jabatan :Kaur Keuangan

Pertanyaan :Bagaiman Proses pengelolaan dana desa?

Jawaban :Prosesnya yaitu keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan

Pertanyaan :Bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam mewujudkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel ?

Jawaban :Untuk pengelolaan sudah cukup baik dan sesuai dengan Pemendagri dan asas pengelolaan keuangan desa dan juga sudah cukup tanggung jawab serta terbuka

Pertanyaan :Apa sajakah hasil dari penggunaan dana desa?

Jawaban :Hasil evaluasi pelaksanaanya telah terbukti menghasilkan sarana atau prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya jalan desa, jembatan, sambungan air bersih, tempat pembuangan sampah, serta menyebarkan tanaman sayur mayur ke setiap warga

Pertanyaan :Siapa pelaksana dana desa ?

Jawaban :Pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan masyarakat desa yaitu perangkat desa sendiri

Pertanyaan : Apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur ?

Jawaban : yang menjadi prioritas dari pembangunan adalah membangun jalan untuk akses warga serta saluran air bersih karena di desa Bulangan sendiri masih kekurangan air bersih karna lokasi desa terletak di sebelah Bengawan Solo

Pertanyaan : Bagaimana keterlibatan pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut ?

Jawaban : Sangat terbuka, karena sebelum melaksanakan pembangunan infrastruktur desa pemerintah desa melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan dengan pihak pihak yang terkait

Pertanyaan : Menurut Ibu, sejauhmana pencapaian terhadap pembangunan infrastruktur di desa Bulangan?

Jawaban : Se jauh ini pembangunan Infrastruktur desa sudah baik, sudah sesuai dengan kebijakan Dana Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014

Pertanyaan : Apakah menurut bapak desa karangsono ini sudah sesuai pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan permendagri?

Jawaban : Sangat sudah sesuai dan saya juga melihat untuk peraturannya ketat dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi

Pertanyaan : Untuk pelaporan laporan realisasi ini apakah secara struktural Bu?

Jawaban : Iya, alurnya dari desa dulu ke kepala desa dan selanjutnya kita serahkan ke kecamatan.

Pertanyaan : Bagaimana tahap perencanaan pengelolaan dana desa di desa ini ?

- Jawaban :perencanaan sudah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 contohnya Dana desa telah disepakati pada hari senin, 15 Oktober dalam rapat pembahasan tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP DESA). Raperdes juga telah dimusyawarakan dan disepakati oleh BPD dan Kepala Desa .
- Pertanyaan :Bagaimana tahap pelaksanaan dari pengelolaan dana desa di desa ini ?
- Jawaban :Sudah sesuai, Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu dengan jumlah tertentu untuk kebutuhan operasional serta melakukan pelaporan nomor rekening kas deswa untuk pengendalian dana transfer dan kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai.
- Pertanyaan :Bagaimana dari tahap penatausahaannya ?
- Jawaban :Untuk penatausahaannya kaur keuangan kurang sesuai karena kaur keuangan tidak cukup memahami proses penatausahaan dan masih dibantu oleh sekertaris dalam proses penatausahaan.
- Pertanyaan :Bagaimana untuk tahap pelaporan ?
- Jawaban :Sudah sesuai dengan Permendagri yaitu kepala desa melaporkan laporan realisasi semester pertama dan kedua ke Kabupaten Dukun.
- Pertanyaan :Bagaimana dengan tahap pertanggungjawabannya ?
- Jawaban :Tahap Pertanggungjawabannya sudah sesuai, laporan pertanggungjawaban dilakukan setiap akhir tahun anggaran oleh kepala desa sesuai dengan Perdes.

Lampiran 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BULANGAN
NOMOR 07 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BULANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	72.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.359.740.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.650.685,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.433.390.685,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	517.609.314,02	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	378.905.685,02	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	10.500.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	10.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	174.000.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	174.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.575.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.575.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	44.730.685,02	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.730.685,02	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	39.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	15.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa	21.600.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	21.600.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	45.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
1.1.92		Honorarium Bendahara Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.94		Pelantikan/Pengambilan Sumpah/Janji Pj. Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Lembaga Lainnya	1.750.000,00	PAD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.1.95		Tali Asih Purna Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Desa Lainnya	2.200.000,00	PAD

Printed by Shikoudes 02/02/2020 09:50:25 Halaman 1

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER
1	2	3	4	5
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.1.96		Biaya Perjalanan Dinas	1.450.000,00	PAD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa ✓	45.021.629,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	34.339.629,00	ADD, DLL, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	34.339.629,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.682.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.682.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan ✓	5.803.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	600.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	250.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.203.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.203.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Cakil	3.500.000,00	PBH
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.3.90		Honorarium Petugas Register Kependudukan	250.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan ✓	81.879.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembuk desa Non Reguler)	2.000.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.000.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.500.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	963.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	963.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.500.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	59.416.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.416.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lo mdes	3.500.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.90		Honorarium Operator Siskeudes/Prodeskel/e-Planing	0,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian ✓	6.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA ✓	862.801.000,00 ✓	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan ✓	42.300.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaiian dll)	10.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	31.500.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	31.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan ✓	264.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	64.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.800.000,00	
2.2.90		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Mobil/Kapal Motor untuk Ambulance Desa/Siaga Desa	200.000.000,00	DDS
2.2.90	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ✓	420.701.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	163.750.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	163.750.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	67.750.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	67.750.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	28.500.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	28.500.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	160.701.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	160.701.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman ✓	135.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	135.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	81.300.000,00 ✓	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.800.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	7.800.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.500.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	8.500.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	21.000.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	2.000.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	8.000.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	3.000.000,00	PBH
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	40.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20.000.000,00	
4.4.91		Bantuan Sosial/Sembako bagi Rumah Tangga Miskin	20.000.000,00	PBH
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	20.000.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	20.000.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.481.710.314,02	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(48.319.629,02)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	48.319.629,02	
		PEMBIAYAAN NETTC	48.319.629,02	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bulanan, 31 Desember 2019

KEPALA DESA

MUDLOHAN

Lampiran 3

Buku Kas Pembantu Pajak

<p style="text-align: center;"> BUKU KAS PEMBANTU PAJAK PEMERINTAH DESA BULANGAN TAHUN ANGGARAN 2018 </p> <p style="text-align: right;">Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018</p>					
No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	10/05/2018	00038/KWT/01.04/2018 Pengadaan Printer			
		Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00	227.273,00
		Potongan Pajak PPH Pasal 22	34.091,00	0,00	261.364,00
2	10/05/2018	00039/KWT/01.04/2018 Pengadaan Leptop			
		Potongan Pajak PPN Pusat	661.818,00	0,00	943.182,00
		Potongan Pajak PPH Pasal 22	102.273,00	0,00	1.045.455,00
3	25/05/2018	00045/KWT/01.04/2018 Belanja Modal Rehab Paving Jalan Watu Tampar (Pasir Sirtu 34,00 m3, Pedel 64,00 m3, Semen Pc 61,00 Zak, Pasir			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.876.682,00	0,00	2.922.137,00
		Potongan Pajak PPH Pasal 22	281.502,00	0,00	3.203.639,00
4	25/05/2018	00110/KWT/01.04/2018 Belanja Modal Rehab Paving Jalan Watu Tampar (Paving Stone K 300 60,00 m2)			
		Potongan Pajak PPH Pasal 22	65.455,00	0,00	3.269.094,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	436.364,00	0,00	3.705.458,00
5	07/06/2018	00058/KWT/01.04/2018 Belanja Modal Pembangunan Jalan Paving Lingkungan 11(Pedel 30,00 m3, Pasir Sirtu 18,50 m3, Semen Pc 31,00			
		Potongan Pajak PPN Pusat	955.773,00	0,00	4.661.231,00
		Potongan Pajak PPH Pasal 22	143.366,00	0,00	4.804.597,00
6	07/06/2018	00059/KWT/01.04/2018 Belanja Modal Pembangunan Jalan Paving Lingkungan 12 (Pedel 15,00 m3, Pasir Sirtu 11,50 m3, Semen Pc 31,00			
		Potongan Pajak PPN Pusat	686.682,00	0,00	5.491.279,00
		Potongan Pajak PPH Pasal 22	103.002,00	0,00	5.594.281,00
7	07/06/2018	00060/KWT/01.04/2018 Belanja Modal Pembangunan Saluran Drainase RT 09 (Batu Kumbung, Kayu Meranti 5/7, Kayu Papan Meranti			
		Potongan Pajak PPH Pasal 22	158.478,00	0,00	5.752.759,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.056.518,00	0,00	6.809.277,00
8	07/06/2018	00111/KWT/01.04/2018 Belanja Modal Pembangunan Jalan Paving Lingkungan 11 (Paving Stone K 300 99,00 m2, Uskup Paving Stone K 300			
		Potongan Pajak PPH Pasal 22	133.050,00	0,00	6.942.327,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	887.000,00	0,00	7.829.327,00
9	07/06/2018	00112/KWT/01.04/2018 Belanja Modal Pembangunan Jalan Paving Lingkungan 12 (Paving Stone K 300 97,00 m2, Uskup Paving Stone K 300			
		Potongan Pajak PPH Pasal 22	869.454,00	0,00	8.698.781,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	130.418,00	0,00	8.829.199,00
10	10/06/2018	00237/KWT/01.04/2018 Belanja Modal Pembangunan Jembatan JUT Kramat			
		Potongan Pajak PPH Pasal 22	856.741,00	0,00	9.685.940,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	128.511,00	0,00	9.814.451,00

Lampiran 4

Buku pembantu kas tunai

<p style="text-align: center;">BUKU KAS UMUM - TUNAI PEMERINTAH DESA BULANGAN TAHUN ANGGARAN 2018</p>								
<p style="text-align: right;">periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018</p>								
No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	02/03/2018		SILPA ADO Tahun 2017					
			Kas di Bendahara	14.000.000,00	0,00	0001/CHQ/01.04/2018	0,00	14.000.000,00
2	02/03/2018		SILPA BHPD Kurang Bayar Tahun 2016					
			Kas di Bendahara	7.891.000,00	0,00	0002/CHQ/01.04/2018	0,00	21.891.000,00
3	03/03/2018		Musyawarah Desa Penentuan PAW Kepala dan Panitia PAW					
			Kas di Bendahara	0,00	3.091.000,00	0001/SPP/01.04/2018	3.091.000,00	18.800.000,00
4	04/03/2018		Musyawarah Desa Perdes STOK					
			Kas di Bendahara	0,00	4.000.000,00	0002/SPP/01.04/2018	7.091.000,00	14.800.000,00
5	06/03/2018		Musyawarah Tentang Penyesuaian Perangkat Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0003/SPP/01.04/2018	9.091.000,00	12.800.000,00
6	06/03/2018		Pengadaan Pakulan Dinas RT					
			Kas di Bendahara	0,00	2.400.000,00	0004/SPP/01.04/2018	11.491.000,00	10.400.000,00
7	06/03/2018		Pengadaan Pakulan Dinas Linnas					
			Kas di Bendahara	0,00	2.400.000,00	0005/SPP/01.04/2018	13.891.000,00	8.000.000,00
8	08/03/2018		Musyawarah Desa Pembentukan Panitia P3D					
			Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0006/SPP/01.04/2018	15.891.000,00	6.000.000,00
9	11/03/2018		Kegiatan Penyelenggaraan Bencana Kerja Pemerintah Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0007/SPP/01.04/2018	17.891.000,00	4.000.000,00
10	13/03/2018		Kegiatan Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0008/SPP/01.04/2018	19.891.000,00	2.000.000,00
11	15/03/2018		Kegiatan Penyelenggaraan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0009/SPP/01.04/2018	21.891.000,00	0,00

Lampiran 5

Penyerahan Dana BLT



Lampiran 6

Kantor Balai Desa Bulangan



Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

[illegible]

Lampiran 8

Biodata Peneliti

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Chetrine Indah Ayu Pangestika
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 16 Oktober 1997
Alamat asal : Jl. KH. Masdarum RT 01 RW 01, Bulangan Dukun Gresik
Telepon/Hp : 085784862955
E-mail : pangestika1610@gmail.com
Facebook : Chetrine Pangestika

Pendidikan Formal

2002-2004 : TK Muslimat NU Miftahul Ulum
2004-2010 : MI Miftahul Ulum Bulangan
2010-2013 : MTS Al Karimi 2 Bulangan
2013-2016 : SMA Al Amin Tunggal Paciran Lamongan
2016-2021 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2016-2017 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly
2016-2017 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki
Malang
2017-2018 : English Language Center (ELC) Maliki Malang
2019 : Pelatihan Program Akuntansi MYOB
2020 : Praktik Kerja Lapangan di KPP Malang Utara

Lampiran 9

Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama : Chetrine Indah Ayu Pangestika

Nim/Jurusan : 16520041/Akuntansi

Pembimbing : Sulis Rochayatun, M.Akun., CA., Ak., CMA., CSRA

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Bulangan
Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2019)

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	19 Februari 2020	Konsultasi Judul	1.
2	28 Februari 2020	Revisi Judul dan Bab 1	2.
3	27 April 2020	Revisi Bab 1	3.
4	3 Januari 2021	Revisi Bab 2	4.
5	20 Januari 2021	Revisi Bab 2 dan 3	5.
6	11 Februari 2021	Revisi Bab 3	6.
7	5 Maret 2021	Acc Sempro	7.
8	6 Mei 2021	Revisi Bab 4 dan 5	8.
9	14 Mei 2021	Revisi Bab 4 dan 5	9.
10	23 Juni 2021	Acc Sidang	10.